

Dinamika Transfigurasi Tata Kelola Global: Posisi Indonesia dalam Restrukturisasi Lanskap Geopolitik Melalui Ekspansi BRICS

Jana Milia
Global-local Strategic Initiative
Janamilia@gsi.or.id

Salsabilah Attamimi
Global-local Strategic Initiative
salsattamimi@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis posisi strategis Indonesia dalam ekspansi BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) yang menandai perubahan dalam lanskap geopolitik global. Dengan mengusung prinsip multipolaritas, BRICS berupaya menciptakan tata kelola dunia yang lebih inklusif dan berkeadilan. Indonesia, sebagai negara berkembang dengan kekuatan ekonomi yang signifikan dan komitmen terhadap kerja sama global, memiliki peluang besar untuk berkontribusi dalam transformasi ini. Penelitian ini akan menganalisis mengenai bagaimana ekspansi BRICS mempengaruhi posisi dan peran Indonesia dalam merestrukturisasi lanskap geopolitik global. Konsep dan Perspektif yang digunakan yaitu *Security Regional Complex* dan *Polarisasi dalam Hubungan Internasional*. Metode penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif yang bersifat deskriptif explanatif. Data dikumpulkan melalui tinjauan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia dapat memainkan peran penting dalam mendorong reformasi tata kelola global, memperkuat kerja sama Selatan-Selatan, dan menyeimbangkan dinamika geopolitik. Namun, tantangan seperti keberagaman kepentingan anggota, hambatan integrasi ekonomi, dan ketegangan geopolitik perlu diatasi. BRICS memberikan platform strategis bagi Indonesia untuk memperluas pengaruh internasional sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan melalui inisiatif seperti *New Development Bank*. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga aktor kunci dalam mengarahkan masa depan tata kelola global.

Kata Kunci — BRICS, Indonesia, Tatanan Global, Geopolitik, Ekonomi, Multipolaritas, Kerjasama Selatan-Selatan

Abstract

This study aims to analyze Indonesia's strategic position in the expansion of BRICS (Brazil, Russia, India, China, and South Africa), which marks a shift in the global geopolitical landscape. Adopting the principle of multipolarity, BRICS seeks to establish a more inclusive and equitable global governance system. As a developing country with significant economic strength and a commitment to global cooperation, Indonesia has substantial opportunities to contribute to this transformation. This research will explore how BRICS expansion impacts Indonesia's role and position in restructuring the global geopolitical landscape. The concepts and perspectives employed include the Regional Security Complex and Polarity in International Relations. The research uses a qualitative descriptive-explanatory method, with data collected through literature review. The findings indicate that Indonesia can play a crucial role in promoting global governance reform, strengthening South-South cooperation, and balancing geopolitical dynamics. However, challenges such as the diversity of member interests, barriers to economic integration, and geopolitical tensions must be addressed. BRICS provides a strategic platform for Indonesia to expand its international influence while supporting sustainable development through initiatives like the New Development Bank. Thus, Indonesia is not merely a beneficiary but also a key actor in shaping the future of global governance.

Keywords — BRICS, Indonesia, Global Order, Geopolitics, Economy, Multipolarity, South-South Cooperation

I. PENDAHULUAN

Perkembangan dinamika global menuntun pada pergeseran tata kelola global. Sejak berakhirnya Perang Dingin, tata kelola sistem internasional pun mengalami perubahan, yang awalnya dwipolar antara dua blok besar, yakni Blok Timur yang dipimpin Uni Soviet dan Blok Barat yang dipimpin Amerika Serikat, menjadi Unipolar disebabkan runtuhnya Uni Soviet pada 1990-an. Konsekuensi keruntuhannya menjadi sangat signifikan bagi dinamika politik internasional. Unipolaritas menyebabkan berbagai peristiwa yang terjadi secara global sedikit banyak turut dipengaruhi oleh kekuatan adidaya yang telah terpusat pada satu polar, menyebabkan pengaruh Amerika Serikat menjadi sangat dominan. Hal tersebut secara signifikan turut mempengaruhi sistem internasional secara keseluruhan.

Tidak hanya itu, gelombang liberalisasi ekonomi pun terjadi secara masif, mendorong globalisasi dan integrasi ekonomi yang lebih dalam. Pada isu keamanan pun, dominasi Amerika menjadi terlampaui berlebihan sebagai adikuasa dengan melabeli dirinya sebagai polisi dunia. Amerika sering kali melakukan intervensi militer dengan dalih melindungi hak asasi manusia atau menyebarkan demokrasi. Hal ini memicu perdebatan sengit mengenai legitimasi intervensi asing dan dampaknya terhadap stabilitas regional (Mearsheimer, 2014).

Dominasi intervensi dan hegemoni Amerika Serikat pasca Perang Dingin memang telah memicu berbagai reaksi di tingkat global. Intervensi militer yang seringkali dianggap sepihak, dominasi ekonomi yang menguntungkan negara asal, serta pengaruh budaya yang kuat telah menimbulkan ketidaknyamanan di banyak negara. Hal ini memicu keresahan dan keinginan untuk mencari alternatif tatanan dunia yang lebih adil dan seimbang. Sebagai respon, banyak negara mulai bersatu dan membentuk blok-blok regional untuk memperkuat posisi tawar mereka dalam hubungan internasional. Kerja sama ekonomi, politik, dan keamanan semakin intensif dilakukan dalam rangka menghadapi tantangan global bersama dan mengurangi ketergantungan pada negara adidaya tunggal.

Munculnya kekuatan-kekuatan ekonomi baru seperti China, India, dan turunan rivalnya, Rusia, bahkan negara-negara di Asia Tenggara semakin mengaburkan dominasi Amerika Serikat. Pertumbuhan ekonomi yang pesat di negara-negara ini telah mengubah peta kekuatan global dan menciptakan tatanan dunia yang lebih multipolar. Selain itu, integrasi ekonomi regional juga semakin memperkuat posisi negara-negara anggota dalam negosiasi global. Semangat solidaritas dan kerja sama antar negara semakin menguat sebagai bentuk perlawanan terhadap hegemoni tunggal. Unipolaritas yang selama ini menjadi ciri khas tatanan dunia pasca Perang Dingin pun mulai terkikis, digantikan oleh tatanan dunia yang lebih kompleks dan dinamis.

Integrasi-integrasi internasional rupanya melahirkan gagasan baru bagi Rusia untuk menginisiasi BRICS. Istilah BRICS pertama kali diperkenalkan oleh ekonom Goldman Sachs, Jim O'Neill, pada tahun 2001. Singkatan ini merujuk pada empat negara ekonomi besar yang sedang berkembang, yaitu Brasil, Rusia, India, dan China. Keempat negara ini dipilih karena memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi dan diperkirakan akan menjadi kekuatan ekonomi utama di masa depan. Ide di balik pembentukan BRICS adalah untuk menyoroti potensi investasi di negara-negara berkembang ini. Namun, seiring berjalannya waktu, BRICS berkembang menjadi lebih dari sekadar istilah investasi. Negara-negara anggota mulai menyadari adanya kesamaan kepentingan dan tantangan yang mereka hadapi, sehingga mendorong mereka untuk memperkuat kerja sama.

Pada tahun 2010, Afrika Selatan bergabung dengan BRICS, sehingga nama kelompok ini berubah menjadi BRICS. Penambahan Afrika Selatan semakin memperkuat representasi BRICS sebagai kelompok negara-negara berkembang yang beragam, baik dari segi geografis maupun ekonomi (BBC, 2024). Sebagai anggota berpengaruh dari berbagai organisasi internasional seperti PBB dan G20, negara-negara BRICS memiliki suara yang kuat dalam isu-isu global seperti perubahan iklim dan perdagangan bebas. Selain itu, keanggotaan mereka dalam organisasi regional seperti Uni Afrika, ASEAN, dan MERCOSUR memperkuat posisi mereka di kawasan masing-masing. Melalui kerjasama regional, BRICS berupaya meningkatkan perdagangan, investasi, dan integrasi ekonomi, serta menghadapi tantangan bersama seperti kemiskinan dan ketidaksetaraan (BRICS Portal, 2023).

Keanggotaan BRICS kemudian berkembang menjadi scope yang lebih luas dan dalam. Negara-negara anggota BRICS mengembangkan semangat kolaborasi dan solidaritas untuk kepentingan dan nilai bersama. Sudah lebih dari 150 pertemuan yang digelar melalui tiga pilar utama kerja sama BRICS, yakni kerja sama politik dan keamanan, kerja sama ekonomi, dan kerja sama budaya dan people-to-people. Lebih dari 30 kesepakatan telah dicanangkan mulai dari Contingent Reserve Arrangement, customs, pajak, kerja sama interbank, budaya, ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi, penelitian agrikultur, efisiensi energi, kebijakan kompetisi dan akademi diplomasi (BRICS South Africa, 2023).

Perkembangan kerja sama serta kolaborasi kemudian membawa BRICS untuk melakukan ekspansi guna inklusifitas. Perluasan keanggotaan yang dilakukan merupakan sebuah respon dan aktualisasi dalam memperkenalkan diri sebagai kekuatan baru pada sistem internasional. Perluasan keanggotaan BRICS juga merupakan sebuah refleksi lanjutan dari perubahan tatanan dunia yang semakin kompleks dan multipolar. Negara-negara berkembang yang selama ini merasa kurang terwakili dalam institusi-institusi global yang didominasi barat seperti G7 atau IMF, melihat BRICS sebagai wadah untuk menyuarakan kepentingan mereka.

BRICS membawa nafas inklusif dan demokrasi yang diidam-idamkan negara-negara berkembang dalam sistem internasional. Perkembangan politik, khususnya ekonomi yang dilihat terjadi pada negara-negara anggota BRICS menyebabkan desentralisasi kekuatan menjadi nyata. Power tidak lagi terkonsentrasi pada Barat semata, sehingga bargaining position negara-negara anggota BRICS meningkat secara pesat. Perluasan keanggotaan BRICS sangat berpotensi terhadap pergeseran tatanan dunia dan sebagai penyeimbang dominasi Barat. Hal ini terlihat jelas pada upaya BRICS dalam menginisiasi pembentukan lembaga-lembaga alternatif guna mengurangi dominasi dan hegemoni Barat, seperti lembaga keuangan alternatif, New Development Bank (Fewings & Chin, 2024).

Upaya-upaya BRICS dalam menunjukkan eksistensi diri menjadi daya tarik tersendiri. Hal tersebut melahirkan minat yang tinggi sejumlah besar negara untuk bergabung dengan BRICS. BRICS dilihat sebagai alternatif yang menguntungkan terhadap sistem global yang ada. Indonesia termasuk salah satu negara yang potensial dalam wacana perluasan BRICS. Gagasan untuk memperluas jangkauan kerja sama BRICS pertama kali mengemuka dalam KTT ke-14 yang diselenggarakan di China pada tahun 2022. Sejak saat itu, diskusi mengenai perluasan keanggotaan menjadi topik utama dalam agenda pertemuan para pemimpin negara anggota. Setelah melalui proses negosiasi yang panjang dan mendalam selama setahun, akhirnya pada KTT ke-15 yang diadakan di Afrika Selatan pada Agustus 2023, sebuah keputusan historis diambil untuk membuka pintu bagi negara-negara lain untuk bergabung dalam organisasi ini (Bartlett, 2023).

Keputusan untuk memperluas keanggotaan BRICS disambut dengan antusiasme yang luar biasa dari berbagai negara di seluruh dunia. Lebih dari 40 negara telah secara resmi menyatakan minatnya untuk menjadi bagian dari kelompok ekonomi yang semakin berpengaruh ini (Acharya et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa BRICS telah berhasil menarik minat banyak negara yang melihat potensi besar dalam kerja sama multilateral di bawah payung organisasi ini. Minat yang tinggi ini dapat mengindikasikan adanya pergeseran dalam tatanan ekonomi global dan semakin meningkatnya pengaruh negara-negara berkembang dalam menentukan arah kebijakan dunia. Indonesia merupakan salah satu dari banyaknya negara yang menunjukkan minat tersebut.

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki posisi geografis yang sangat strategis di jantung Asia Tenggara. Letaknya yang berada di persimpangan jalur perdagangan internasional antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik menjadikan Indonesia sebagai titik sentral bagi aktivitas ekonomi dan budaya di kawasan ini. Selain itu, kekayaan alam yang melimpah seperti minyak bumi, gas alam, mineral, dan hasil hutan menjadikan Indonesia sebagai negara dengan potensi ekonomi yang sangat besar.

Keanekaragaman hayati yang tinggi juga menjadi aset berharga bagi Indonesia dalam bidang pariwisata dan penelitian.

Dengan segala potensi yang dimiliki, Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam dinamika global. Sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, Indonesia memiliki pengaruh yang signifikan dalam berbagai forum internasional. Selain itu, komitmen Indonesia terhadap prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan non-blok menjadikan negara ini sebagai mediator yang dipercaya dalam menyelesaikan berbagai konflik di kawasan. Potensi Indonesia sebagai pemain kunci semakin diperkuat dengan bergabungnya dalam berbagai organisasi internasional seperti ASEAN, G20, dan Organisasi Negara-negara Non-Blok. Dengan demikian, Indonesia dapat berkontribusi dalam membentuk tatanan dunia yang lebih adil dan berkelanjutan.

Visi Indonesia sebagai negara berkembang adalah untuk menjadi negara maju yang mandiri, berdaulat, bersatu, adil, dan makmur. Sejalan dengan visi ini, Indonesia sangat mendukung penguatan kerja sama Selatan-Selatan seperti yang menjadi salah satu tujuan utama BRICS. Kerja sama Selatan-Selatan memungkinkan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk saling belajar, berbagi pengalaman, dan memperkuat posisi tawar dalam tata kelola global.

Dengan bekerja sama dengan negara-negara BRICS, Indonesia dapat mengakses teknologi, investasi, dan pasar yang lebih luas, serta memperkuat pengaruhnya dalam pengambilan keputusan global. Indonesia juga memiliki komitmen yang kuat untuk mendorong reformasi tata kelola global yang lebih adil dan inklusif. Hal ini sejalan dengan tujuan BRICS yang ingin menciptakan tatanan dunia yang lebih multipolar, di mana negara-negara berkembang memiliki peran yang lebih besar. Indonesia percaya bahwa sistem global saat ini masih didominasi oleh negara-negara maju, dan perlu ada reformasi mendasar untuk mengakomodasi kepentingan negara-negara berkembang.

Dengan bergabung dalam BRICS, Indonesia dapat berkontribusi dalam upaya bersama untuk mereformasi lembaga-lembaga keuangan internasional, seperti IMF dan Bank Dunia, agar lebih responsif terhadap kebutuhan negara-negara berkembang. Sehingga menjadi menarik untuk menganalisa bagaimana ekspansi BRICS mempengaruhi posisi dan peran Indonesia dalam merestrukturisasi lanskap geopolitik global? Dengan demikian, Indonesia tidak hanya menjadi penerima manfaat dari kerja sama BRICS, tetapi juga berperan aktif dalam membentuk masa depan tatanan dunia.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Regional Security Complex

Barry Buzan, dalam karyanya "People, State and Fear" yang terbit pada tahun 1991, mengusulkan konsep Regional Security Complex. Konsep ini menggambarkan suatu kelompok negara yang saling terkait erat satu sama lainnya sehingga keamanan masing-masing negara menjadi saling bergantung dan tak terpisahkan.

Dalam pandangan Buzan, negara-negara dalam yang berada dalam suatu kawasan terikat oleh berbagai faktor, seperti sejarah bersama, perbatasan yang berdekatan, kepentingan ekonomi yang saling terkait, atau persepsi ancaman yang sama. Keterkaitan ini membuat keamanan satu negara tidak dapat dipisahkan dari keamanan negara-negara lain dalam kompleks tersebut (Buzan, 2007). Konsep Regional Security Complex memiliki implikasi penting bagi studi hubungan internasional. Pertama, konsep ini menunjukkan bahwa keamanan nasional tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer suatu negara, tetapi juga oleh interaksi dengan negara-negara lain dalam lingkungan regional. Kedua, konsep ini menyoroti pentingnya kerja sama regional dalam mengatasi tantangan keamanan bersama. Ketiga, konsep ini juga menyarankan bahwa perubahan pada tingkat kawasan dapat memiliki dampak yang signifikan pada tatanan keamanan global.

Meskipun definisi Regional Security Complex mengalami evolusi seiring berjalannya waktu dan berbagai interpretasi dari para pakar hubungan internasional, inti dari teori ini tetap konsisten. Regional Security Complex menggambarkan suatu kelompok negara yang saling terhubung dalam suatu sistem keamanan yang saling bergantung. Dalam sistem ini, tindakan satu negara akan berdampak signifikan terhadap keamanan negara-negara lain di dalam kompleks tersebut. Dua pilar utama yang menopang Regional Security Complex adalah amity dan enmity, serta distribusi kekuasaan (Buzan & Wæver, 2003). Amity merujuk pada hubungan persahabatan atau kerja sama antar negara dalam suatu kompleks keamanan. Hubungan ini dibangun atas dasar kepentingan bersama, nilai-nilai yang sama, atau ancaman eksternal yang sama. Amity menciptakan ikatan yang kuat dan mendorong kerjasama dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, politik, dan keamanan. Enmity, di sisi lain, menggambarkan hubungan permusuhan atau persaingan antar negara. Hubungan ini seringkali didorong oleh sejarah konflik, perbedaan ideologi, perebutan sumber daya, atau persepsi ancaman yang berbeda. Enmity dapat menciptakan ketidakstabilan dan meningkatkan risiko konflik bersenjata dalam suatu kompleks keamanan. Distribusi kekuasaan di antara negara-negara dalam suatu kawasan sangat mempengaruhi dinamika hubungan antar negara. Konsentrasi kekuasaan pada satu atau beberapa negara dapat menciptakan hierarki kekuasaan dan memicu persaingan antar negara. Sebaliknya, distribusi kekuasaan yang lebih merata dapat mendorong kerjasama dan mengurangi risiko konflik.

Distribusi kekuasaan dalam suatu Regional Security Complex sangat dipengaruhi oleh variabel internal kawasan. Faktor-faktor seperti letak geografis, interaksi antar negara, dan kesamaan sistem (budaya, ekonomi, sosial, politik) berperan penting dalam membentuk struktur kekuasaan di dalam kawasan. Letak geografis yang berdekatan misalnya,

dapat memudahkan interaksi dan kerjasama antar negara, namun juga dapat memicu persaingan atas sumber daya yang sama. Interaksi yang intens antar negara, baik dalam bentuk kerjasama maupun persaingan, akan membentuk pola hubungan yang khas dan mempengaruhi distribusi kekuasaan. Selain itu, kesamaan sistem di antara negara-negara dalam suatu kawasan dapat memperkuat kohesivitas dan mempermudah kerjasama, namun juga dapat menciptakan homogenitas yang membatasi keragaman dan dinamika dalam kawasan.

Variabel eksternal juga memainkan peran yang sangat signifikan dalam mempengaruhi distribusi kekuasaan dalam suatu kompleksitas kawasan. Aktor-aktor di luar kawasan, seperti negara-negara besar atau organisasi internasional, dapat mempengaruhi keseimbangan kekuasaan dengan cara membentuk aliansi dengan negara-negara dalam kawasan atau dengan cara langsung terlibat dalam konflik di kawasan tersebut. Intervensi aktor eksternal dapat mengubah konfigurasi kekuasaan yang ada dan memicu dinamika baru dalam hubungan antar negara. Selain itu, kondisi internasional yang lebih luas, seperti perubahan dalam sistem internasional atau munculnya ancaman global, juga dapat mempengaruhi distribusi kekuasaan dalam suatu kawasan. Negara-negara dalam kawasan mungkin perlu menyesuaikan strategi mereka untuk menghadapi tantangan eksternal dan mempertahankan atau meningkatkan pengaruhnya dalam kawasan.

Konsep Regional Security Complex, yang diperkenalkan oleh Barry Buzan, sangat relevan untuk menganalisis dinamika kelompok seperti BRICS. Regional Security Complex menggambarkan suatu kelompok negara yang saling terkait erat dalam hal keamanan, di mana tindakan satu negara dapat berdampak signifikan pada negara-negara lain di dalam kompleks tersebut. BRICS didirikan dengan tujuan utama untuk meningkatkan kerjasama ekonomi antar anggotanya. Hal ini menciptakan ikatan ekonomi yang kuat dan mendorong terciptanya amity di antara negara-negara anggota. Tidak hanya itu, meskipun terdapat perbedaan dalam sistem politik dan budaya, negara-negara BRICS umumnya memiliki tujuan yang sama, yaitu memperkuat posisi tawar negara berkembang dalam tatanan global. Hal ini menciptakan dasar bersama untuk membangun kepercayaan dan kerjasama. Solidaritas tersebut juga merupakan hasil dari persamaan perspektif dalam melihat hegemoni barat dan kesenjangan yang terjadi antara negara-negara di "Utara" dan "Selatan" sebagai musuh bersama.

Polaritas Internasional

Dalam dunia politik internasional, kekuasaan tidak pernah terbagi secara merata. Sebaliknya, kekuasaan selalu condong ke beberapa negara tertentu. Karena itulah, sepanjang sejarah, kita melihat pola-pola distribusi kekuasaan yang berbeda-beda. Pola-pola ini terus berubah seiring waktu karena kekuatan negara-negara juga berubah. Para ahli hubungan internasional mengidentifikasi tiga pola utama dalam distribusi kekuasaan ini: unipolar, bipolar, dan multipolar.

Masing-masing pola ini menggambarkan jumlah negara kuat yang menguasai panggung dunia dan bagaimana mereka saling berhubungan. Unipolar merupakan istilah untuk satu negara sangat dominan dan memiliki kekuatan jauh di atas negara-negara lain. Sedangkan bipolar adalah istilah untuk menggambarkan dua negara adidaya saling bersaing untuk mendominasi dunia. Ada pun multipolar merupakan kekuasaan tersebar di beberapa negara besar, sehingga tidak ada satu negara pun yang sangat dominan (Horness, 2015).

Sistem unipolar memiliki ciri-ciri khusus. Pertama, meskipun satu negara sangat kuat, ia tidak bisa sepenuhnya mengendalikan negara lain karena adanya sistem negara-negara yang saling independen (anarki). Kedua, negara yang sangat kuat ini tidak bisa sepenuhnya mencegah negara-negara lain untuk mencari keseimbangan kekuatan, meskipun sulit. Ketiga, karena dominasinya yang sangat kuat, tidak ada negara lain yang mampu menandingi kekuatan negara unipolar ini (Monteiro, 2011). Berbeda dengan unipolar, sistem bipolar dicirikan oleh keberadaan dua kekuatan besar yang saling berhadapan dan bersaing untuk dominasi global. Negara-negara yang lebih kecil cenderung bersekutu dengan salah satu dari dua kutub ini, membentuk blok-blok yang saling berlawanan. Persaingan antara kedua kutub ini seringkali bersifat "zero-sum game", di mana keuntungan yang diperoleh satu pihak akan menjadi kerugian bagi pihak lainnya. Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet adalah contoh klasik dari sistem bipolar, di mana kedua negara adidaya ini menguasai panggung dunia dan memicu konflik-konflik di berbagai belahan dunia. Sedangkan sistem multipolar, sebagaimana namanya, ditandai oleh keberadaan beberapa pusat kekuatan yang seimbang. Tidak ada satu negara pun yang dominan secara mutlak, sehingga persaingan dan kerjasama antar negara menjadi lebih kompleks. Dalam sistem multipolar, aliansi dan persaingan dapat berubah-ubah dengan cepat, tergantung pada kepentingan masing-masing negara. Periode sebelum Perang Dunia I sering dianggap sebagai contoh klasik dari sistem multipolar, di mana beberapa negara besar di Eropa saling bersaing untuk pengaruh dan kekuasaan.

Lahirnya BRICS merupakan sebuah momentum yang melahirkan pergeseran polaritas dalam hubungan internasional. Munculnya BRICS menandai babak baru dalam dinamika kekuasaan global, yang secara signifikan menggeser pola polaritas dalam hubungan internasional. Selama berdekade-dekade, sistem internasional didominasi oleh negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat. Namun, dengan kebangkitan ekonomi pesat negara-negara BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan), tatanan dunia menjadi lebih multipolar.

Alih-alih hanya beberapa negara adidaya yang mendominasi, kini terdapat pusat-pusat kekuatan baru yang semakin berpengaruh dalam berbagai bidang, mulai dari ekonomi hingga politik. Hal ini menantang hegemoni Barat dan membuka ruang bagi dialog serta kerjasama yang lebih inklusif dalam mengatasi tantangan global.

III. METODE PENELITIAN

Kajian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif eksplanatif untuk menganalisis dinamika transfigurasi tata kelola global dalam konteks ekspansi BRICS dan posisi Indonesia di dalamnya. Data primer akan diperoleh melalui literature review terhadap berbagai kebijakan pemerintah, laporan lembaga internasional, serta literatur akademik yang relevan. Data tersebut dianalisis secara deskriptif dan eksplanatif untuk mengidentifikasi pola, tren, dan faktor-faktor yang mempengaruhi posisi Indonesia dalam lanskap geopolitik yang sedang berubah. Sumber data ini akan memberikan gambaran yang komprehensif tentang kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia dan negara-negara BRICS, serta pandangan para ahli mengenai dinamika geopolitik global. Selain itu, data sekunder seperti artikel jurnal, buku, laporan penelitian, dan berita juga akan digunakan untuk memperkaya analisis.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

BRICS: Pilar Baru Tata Kelola Global

BRICS yang merupakan akronim dari sebuah representasi 5 negara ekonomi besar yang tergabung menjadi sebuah grup. Negara-negara ini ialah Brazil, Rusia, India, dan Afrika Selatan. BRICS menjadi salah satu organisasi kerjasama antar negara dengan ekonomi yang besar berdasarkan porsi global ekonomi yang mencakup 42% populasi dunia, 23% GDP global, serta 16% perdagangan dunia. BRICS bertujuan untuk bekerja sama dalam strategi ekonomi, politik dan pembangunan untuk memperkuat pengaruh dalam konstelasi internasional. Pembentukan BRICS (Sebelumnya BRIC) merupakan inisiasi Rusia untuk memperluas dan memperkuat perekonomian khususnya dinegara dengan potensi perekonomian yang besar. Dalam langkah pembentukan BRICS, Rusia dan negara-negara yang tergabung diawal melakukan kegiatan yang pada akhirnya secara resmi membentuk BRICS seperti:

1. 20 September 2006 : Pada Sidang Majelis Umum PBB di Newyork, diadakan pertemuan yang dinisiasi Rusia yaitu Vladimir Putin untuk mengumpulkan Perdana Menteri terkait seperti Brazil, China, dan India yang menyatakan minat untuk memperluas kerjasama multilateral antar negara.
2. 16 Mei 2008 : BRICS melalui Pertemuan Menteri Luar Negeri mengeluarkan Komunike Bersama terkait isu isu global. Pertemuan ini diadakan di kota Yekaterinburg, Rusia.
3. 16 Juni 2009: BRIC mengadakan KTT pertama kali di Russia. KTT ini diadakan sebelum Afrika Selatan bergabung.
4. 2010 : Afrika Selatan resmi bergabung dengan BRIC yang kemudian berubah menjadi BRICS

5. 2014: KTT ke-6 di Fortaleza dan Brasilia menghasilkan pembentukan NDB dan Perjanjian Cadangan Kontingensi BRICS dengan total \$200 miliar.
6. 2015: KTT ke-7 di Ufa menghasilkan Rencana Aksi Ufa dan Strategi Kemitraan Ekonomi BRICS.
7. 2016: India menjadi ketua, dengan KTT ke-8 di Goa membahas energi, perdagangan, kerja sama perbankan, pendidikan, dan pariwisata.
8. 2017-2020: Kepresidenan BRICS berpindah ke Tiongkok (2017), Afrika Selatan (2018), Brasil (2019), dan Rusia (2020).

Dalam pembentukan BRICS memiliki tujuan dalam kerjasama penguatan strategi ekonomi dan Pembangunan serta pengaruh di kancah internasional. Selain itu, BRICS juga hadir sebagai alat untuk melawan dominasi negara-negara Barat dalam institusi global seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF). Kelompok ini mendorong tatanan dunia yang lebih inklusif dan multipolar. Hal ini dibuktikan dengan pembentukan Bank Pembangunan Baru atau New Development Bank. Bank ini Didirikan pada tahun 2014, NDB adalah bank pembangunan multilateral yang dibentuk oleh BRICS untuk membiayai proyek infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan di negara anggota dan negara berkembang lainnya. Bank ini berkantor pusat di Shanghai, Tiongkok.

Selanjutnya BRICS melaksanakan KTT tahunan yang membahas strategi kerjasama dalam menangani tantangan global. Perkembangan selanjutnya, pada tahun 2024, BRICS berhasil mengekspansi organisasi dengan membuka keanggotaan baru bagi negara-negara lain yang ingin bergabung. Tepatnya, Pada Agustus 2023, dalam KTT BRICS ke-15, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa mengumumkan bahwa enam negara pasar berkembang (Argentina, Mesir, Ethiopia, Iran, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab) telah diundang untuk bergabung dengan blok tersebut. Keanggotaan penuh dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Januari 2024. Akan tetapi Argentina menarik keanggotaan dikarenakan pergantian Presiden yang mengubah kebijakan. Selanjutnya, Pada 24 Oktober 2024, 13 negara tambahan, yaitu Aljazair, Belarusia, Bolivia, Kuba, Indonesia, Kazakhstan, Malaysia, Nigeria, Thailand, Turki, Uganda, Uzbekistan, dan Vietnam, diundang untuk berpartisipasi sebagai negara mitra. Negara mitra yang artinya bukan member penuh, yang kemudian dapat dikonsiderasikan menjadi anggota penuh di waktu selanjutnya.

Restrukturisasi Geopolitik: Implikasi Bagi Negara Berkembang

Pembentukan BRICS yang diinisiasikan oleh Rusia merupakan salah satu langkah oposisi terhadap kekuatan hegemoni negara-negara Barat yang dianggap dominan kekuasaan di dunia saat ini. Rusia dan negara anggota BRICS melihat ketidakseimbangan kekuasaan menjadi salah satu alasan pembentukan organisasi baru. Adapun BRICS memiliki kekuatan- kekuatan seperti:

1. Ekonomi yang beragam, karena menyangkut negara-negara yang merepresentasikan benua, seperti Eropa, Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Perbedaan ini menyangkut model regulasi, hukum, atau peraturan perdagangan. Baik

Eropa, Asia , Afrika, ataupun Amerika Selatan memiliki ciri dan model tersendiri, misalnya Eropa memiliki ekonomi terpadu yang berbasis industri, Afrika bergantung kepada sumber daya alam, Asia dengan model dan fokus pertumbuhan cepat, dan lain-lainnya.

2. Sumber daya alam yang berlimpah, hal ini dapat dijelaskan melalui kombinasi jumlah populasi negara-negara anggota BRICS yang mencapai 42% dari jumlah populasi dunia.

3. Perkembangan Pengaruh, sejak awal pembentukan BRICS merupakan inisiasi kecil yang dicanangkan oleh Rusia sebagai keseimbangan perekonomian. Akan tetapi, dengan pengaruh yang terus berkembang, BRICS mampu membawa negara-negara Selatan dengan ekonomi yang besar untuk bergabung dan berekspansi. Saat ini ekspansi telah mencapai negara-negara Selatan lainnya seperti Aljazair, Belarusia, Bolivia, Kuba, Indonesia, Kazakhstan, Malaysia, Nigeria, Thailand, Turki, Uganda, Uzbekistan, dan Vietnam. Ekspansi ini tidak hanya menguntungkan bagi negara anggota BRICS, akan tetapi bagi negara berkembang atau South - South Cooperation yang mendorong kerjasama antar negara.

Dengan demikian, dalam perkembangan BRICS telah mengalami transformasi signifikan sejak pembentukannya, BRICS yang diawal pembentukan merupakan kerjasama ekonomi juga telah bergerak sebagai geopolitik organisasi ditengah krisis multilateralisme dunia saat ini dan kebangkitan kembali persaingan kekuatan besar. Konteks ini memberikan tantangan sekaligus peluang bagi BRICS dalam upayanya mendefinisikan kembali perannya dalam kerangka tata kelola global. BRICS dianggap sebagai upaya untuk menyeimbangkan dominasi Barat dalam tatanan global.

Potensi yang dimiliki BRICS untuk merestruktur tata global baru tercermin dari potensi untuk mendemokratisasi struktur tata kelola global dengan meningkatkan pengaruh di institusi seperti IMF dan Bank Dunia serta pembentukan New Development Bank. Langkah-langkah kerjasama ekonomi yang mengatasi hambatan infrastruktur dan memperkuat kebijakan perdagangan, BRICS dapat memperluas kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan.

Posisi Strategis Indonesia di Tengah Ekspansi BRICS

Pada Oktober 2024, Indonesia diundang untuk menjadi salah satu negara mitra bagi ekspansi BRICS. Indonesia berada diantara 13 negara lainnya yang diundang untuk menghadiri KTT BRICS. Indonesia sebagai salah satu negara Global South memiliki peranan penting dalam keanggotaan BRICS, hal ini dikarenakan negara-negara berkembang membawa perspektif unik dalam upaya menciptakan tatanan global yang lebih inklusif dan adil. Ditengah ekspansi BRICS, Indonesia dapat mengambil keuntungan yang berdampak seperti :

1. Mendorong Perubahan Tata Kelola Global

Polarisasi dunia yang condong mendahulukan kepentingan-kepentingan negara barat, seperti halnya dalam institusi-institusi ekonomi, politik, dan sebagainya menuntut reformasi institusi global seperti halnya IMF dan Bank Dunia atau organisasi dunia lain agar lebih mencerminkan kepentingan negara-negara di luar Barat. BRICS memperjuangkan inklusi ekonomi global yang lebih luas untuk mengatasi ketimpangan dalam pengambilan keputusan terutama yang berkaitan dengan ekonomi dan politik. Indonesia sebagai negara yang yang

menganut politik luar negeri bebas aktif dapat berpartisipasi dalam BRICS sebagai langkah perubahan yang sejalan dengan prinsip-prinsip luar negeri yang adil, damai, berprrikemanusiaan dan keadilan.

2. Peningkatan Kerjasama Selatan-Selatan

Negara berkembang dalam BRICS menekankan pentingnya kerja sama Selatan-Selatan, yang melibatkan transfer pengetahuan, teknologi, dan modal antar negara berkembang. Inisiatif ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada kekuatan ekonomi tradisional di Barat. Dalam pertumbuhan perekonomian, Indonesia dapat melihat ini sebagai langkah yang inovatif dalam membangun kerjasama antar negara terlebih antar negara berkembang yang sering kali memiliki ketergantungan terhadap negara-negara besar lainnya. Hal ini juga dapat menjadi kesempatan bagi negara kecil untuk aktif dalam berperan meningkatkan perekonomian dan pengaruh lainnya.

Indonesia khususnya dapat menggunakan platform BRICS sebagai alat untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan, investasi, dan inovasi teknologi. Contohnya adalah upaya bersama dalam pengembangan New Development Bank (NDB), yang memberikan pinjaman untuk proyek infrastruktur di negara anggota dan negara berkembang lainnya.

3. Penyeimbang Geopolitik

Negara-negara berkembang yang tergabung dalam BRICS dapat menjadi penyeimbang geopolitik khususnya dalam menghadapi dominasi negara-negara maju dalam konstelasi politik internasional. Kerjasama ini akan menciptakan tatanan multipolar yang lebih stabil, sehingga sejalan dengan kepentingan nasional dan politik luar negeri Indonesia yang tidak berpihak pada satu polar atau blok.

4. Platform Isu-Isu Global

Dalam keanggotaan BRICS, tidak hanya membahas mengenai kerjasama ekonomi dan isu politik lainnya, akan tetapi BRICS juga berkomitmen dalam membahas isu-isu kontemporer seperti perubahan iklim dan Pembangunan yang berkelanjutan, isu terorisme dan keamanan global, reformasi institusi keuangan internasional, serta peningkatan perdagangan dan investasi antar negara-negara anggota. Hal ini akan menjadi keuntungan untuk Indonesia yang memiliki misi pembangunan berkelanjutan. Serta, BRICS dapat menjadi salah satu platform dalam memperjuangkan isu-isu penting lainnya.

BRICS & Agenda Indonesia dalam Tata Kelola Global & Tantangannya

Undangan kemitraan bagi Indonesia dalam rangka kerjasama BRICS menjadi langkah besar bagi perkembangan BRICS. Indonesia yang merupakan negara dengan sumber daya dan perekonomian yang besar serta memiliki kekuatan ekonomi kolektif khususnya keanggotaan Indonesia dalam G-20, akses ke negara-negara ASEAN dimana Indonesia merupakan jaringan ekonomi dan diplomasi yang luas di ASEAN hal ini tentu penting dalam rangka memperluas pengaruh geopolitik dan ekonomi BRICS itu sendiri. Terlebih Indonesia merupakan sumber populasi yang berjumlah 270 juta jiwa yang dapat menawarkan pasar yang besar bagi

negara-negara anggota BRICS. Terlebih dalam bidang politik, Sebagai negara yang berkomitmen pada prinsip non-blok, Indonesia dapat membantu BRICS dalam menavigasi lanskap geopolitik yang kompleks. Pendekatan diplomatik Indonesia yang pragmatis dan independen dapat memberikan perspektif baru dalam pengambilan keputusan strategis BRICS. Dengan demikian, Indonesia merupakan salah satu negara penting dalam ekspansi dan pengaruh BRICS itu sendiri.

Akan tetapi, Meskipun BRICS memiliki potensi besar sebagai koalisi ekonomi yang sedang berkembang, tantangan-tantangan seperti keberagaman kepentingan, hambatan integrasi ekonomi, ketegangan geopolitik, masalah keberlanjutan lingkungan, dan kebutuhan kerangka institusi yang lebih kokoh memerlukan upaya bersama untuk diatasi. BRICS memiliki tantangan-tantangan yang menjadi pertimbangan bagi Indonesia

Tantangan-tantangan ini berasal dari dinamika internal antar anggota dan tekanan eksternal dari lanskap geopolitik global. Salah satu tantangan utama adalah keberagaman kepentingan dan kondisi ekonomi di antara negara-negara BRICS. Setiap negara anggota memiliki sistem politik, struktur ekonomi, dan prioritas pembangunan yang unik, yang dapat mengarah pada agenda yang bertentangan. Sebagai contoh, India menekankan kolaborasi ekonomi dan pertumbuhan bersama, anggota lain mungkin lebih memprioritaskan aspek lain dari kepentingan nasional mereka, yang dapat menyebabkan fraksi dalam BRICS itu sendiri (Singh, 2023; Vyas-Doorgapersad, 2022). Perbedaan ini mempersulit pengambilan keputusan kolektif dan pelaksanaan strategi terpadu yang penting untuk mengatasi isu global secara efektif.

Selain itu, integrasi ekonomi di antara negara-negara BRICS belum mencapai potensi penuh. Penelitian menunjukkan bahwa perdagangan intra-BRICS belum meningkat secara signifikan sejak pembentukan blok ini, sering kali menghasilkan pengalihan perdagangan daripada peningkatan (Wani, 2023). Biaya perdagangan yang tinggi, infrastruktur yang tidak memadai, dan tingkat pembangunan ekonomi yang bervariasi di antara anggota semakin memperburuk masalah, serta menghambat kerja sama ekonomi yang lebih dalam strategi ekonomi yang kohesif membatasi kemampuan BRICS untuk menghadapi negosiasi internasional secara bersatu, terutama melawan negara maju yang mendominasi perdagangan dan keuangan global.

Tantangan lain yang krusial adalah ketegangan geopolitik yang ada baik di dalam maupun di luar kerangka BRICS. Misalnya, sengketa perbatasan yang sedang berlangsung antara India dan Tiongkok menimbulkan risiko terhadap kohesi, karena ketegangan ini dapat memengaruhi hubungan diplomatik dan upaya kolaboratif. Selain itu, dinamika kekuatan global yang berubah, terutama meningkatnya ketegangan Amerika Serikat dan sekutunya, menciptakan lingkungan di mana BRICS harus menavigasi lanskap geopolitik yang kompleks dan berusaha meningkatkan pengaruhnya (Vyas-Doorgapersad, 2022; Pyzhev, 2023).

Keberlanjutan lingkungan juga menjadi tantangan besar bagi negara-negara BRICS. Pertumbuhan ekonomi yang cepat telah menyebabkan degradasi lingkungan yang signifikan, menimbulkan kekhawatiran tentang keberlanjutan jangka panjang dari model pembangunan mereka (Tian et al., 2020). Kebutuhan akan pendekatan yang seimbang yang mendamaikan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan sangat

penting bagi masa depan BRICS. Tantangan ini diperburuk oleh tingkat komitmen yang berbeda terhadap kebijakan lingkungan di antara negara-negara anggota, yang dapat menghambat tindakan kolektif terhadap isu lingkungan global (Tian et al., 2020).

Lebih lanjut, kelompok BRICS menghadapi tantangan dalam membangun kerangka kerja yang lebih terinstitusionalisasi untuk kerja sama. Saat blok ini berusaha memperluas pengaruhnya, ada kebutuhan yang meningkat akan mekanisme formal yang memfasilitasi kolaborasi di berbagai sektor, termasuk perdagangan, investasi, dan teknologi (Pyzhev, 2023; Lissovolik, 2023). Pendirian New Development Bank (NDB) merupakan langkah ke arah ini, tetapi efektivitas institusi semacam itu bergantung pada komitmen negara-negara anggota untuk bekerja bersama menuju tujuan bersama (Morozkina, 2015).

Pada akhirnya, meskipun BRICS memiliki potensi besar sebagai koalisi ekonomi berkembang, blok ini menghadapi banyak tantangan yang harus diatasi untuk meningkatkan efektivitas dan pengaruhnya dalam tata kelola global. Keberagaman kepentingan di antara negara anggota, hambatan integrasi ekonomi, ketegangan geopolitik, masalah keberlanjutan lingkungan, dan kebutuhan akan kerangka institusional yang lebih kuat adalah area kritis yang membutuhkan upaya bersama. Mengatasi tantangan ini akan menjadi kunci bagi BRICS untuk mewujudkan ambisinya dan memberikan kontribusi berarti bagi lanskap ekonomi global.

V. KESIMPULAN & REKOMENDASI

Pada akhirnya, meskipun BRICS memiliki potensi besar sebagai koalisi ekonomi berkembang, blok ini menghadapi banyak tantangan yang harus diatasi untuk meningkatkan efektivitas dan pengaruhnya dalam tata kelola global. Keberagaman kepentingan di antara negara anggota, hambatan integrasi ekonomi, ketegangan geopolitik, masalah keberlanjutan lingkungan, dan kebutuhan akan kerangka institusional yang lebih kuat adalah area kritis yang membutuhkan upaya bersama. Mengatasi tantangan ini akan menjadi kunci bagi BRICS untuk mewujudkan ambisinya dan memberikan kontribusi berarti bagi lanskap ekonomi global.

Indonesia memiliki posisi strategis dalam dinamika global melalui kemitraannya dengan BRICS, sebuah organisasi yang berkembang untuk menciptakan tatanan dunia multipolar yang lebih inklusif. Sebagai negara dengan ekonomi besar di kawasan Global South, Indonesia dapat memainkan peran penting dalam mendorong reformasi tata kelola global, memperkuat kerja sama Selatan-Selatan, dan menyeimbangkan geopolitik dunia. Selain itu, partisipasi dalam BRICS memberikan peluang untuk mendorong pembangunan berkelanjutan, memperluas pasar, dan memanfaatkan New Development Bank (NDB) untuk pembiayaan infrastruktur.

Namun, terdapat tantangan yang harus dihadapi, seperti keberagaman kepentingan di antara negara anggota, ketegangan geopolitik, dan kebutuhan akan mekanisme kerja sama yang lebih terinstitusionalisasi. Dengan kebijakan yang terarah dan kolaborasi yang efektif, Indonesia dapat memanfaatkan kemitraannya dengan BRICS

untuk memperkuat posisinya di panggung internasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan nasional. Indonesia harus memastikan bahwa keterlibatan dalam BRICS tetap sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif dan berkontribusi pada kepentingan nasional. Adapun Rekomendasi Kebijakan Indonesia terhadap BRICS:

1. Memanfaatkan Kemitraan untuk Reformasi Tata Kelola Global
 - Indonesia dapat mendorong agenda reformasi institusi global seperti IMF dan Bank Dunia untuk mencerminkan kepentingan negara berkembang.
 - Peran aktif dalam BRICS dapat digunakan sebagai platform untuk memperjuangkan prinsip-prinsip multipolaritas dan keadilan ekonomi global.
2. Penguatan Kerja Sama Selatan-Selatan:
 - Indonesia harus fokus pada transfer teknologi, investasi, dan kolaborasi ekonomi melalui platform BRICS.
 - Promosi perdagangan intra-BRICS dan penggunaan NDB untuk mendanai proyek infrastruktur strategis di dalam negeri.
3. Pendekatan Diplomasi yang Pragmatis:
 - Mengelola hubungan yang seimbang di tengah perbedaan kepentingan geopolitik antara negara-negara BRICS.
 - Menekankan prinsip non-blok untuk menghindari keterlibatan dalam konflik yang dapat menghambat kerja sama.
4. Fokus pada Isu-Isu Global:
 - Mendorong BRICS untuk memprioritaskan isu-isu perubahan iklim, keamanan pangan, dan pembangunan berkelanjutan yang relevan dengan agenda nasional Indonesia.
 - Memanfaatkan forum BRICS untuk membangun kerja sama di sektor energi bersih dan pengelolaan sumber daya alam.
5. Memperkuat Integrasi Ekonomi:
 - Mendorong penghapusan hambatan perdagangan dan pembangunan infrastruktur logistik untuk meningkatkan perdagangan intra-BRICS.
 - Memanfaatkan peluang untuk memperluas jaringan pasar melalui keanggotaan mitra BRICS.

REFERENSI

- [1] Acharya, B., Kumwenda, O., & Janowski, T. (2023, August 21). What is BRICS, which countries want to join and why? Reuters. diakses November 26, 2024, from <https://www.reuters.com/world/what-is-brics-who-are-its-members-2023-08-21/>
- [2] Bartlett, K. (2023, July 21). 40 more countries want to join BRICS, says South Africa. VOA. diakses November 20, 2024, from <https://www.voanews.com/a/more-countries-want-to-join-brics-says-south-africa-7190526.html>
- [3] BBC. (2024, October 28). BRICS: Apa itu BRICS dan mengapa Indonesia ingin bergabung di dalamnya? BBC. diakses from <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4gpp3ke2800>
- [4] BRICS Portal. (2023). History of BRICS. brics. Retrieved November 5, 2024, from <https://infobrics.org/page/history-of-brics/>

- [5] BRICS South Africa. (2023). Evolution of BRICS – BRICS 2023. Brics. diakses November 5, 2024, from <https://brics2023.gov.za/evolution-of-brics/>
- [6] Brosig, M. (2021). Has BRICS lost its appeal? The foreign policy value added of the group. *International Politics*, 61(1), 106-124. <https://doi.org/10.1057/s41311-021-00327-y>
- [7] Buzan, B. (2007). *People, states & fear: An agenda for international security studies in the post-Cold War era*. ECPR Press.
- [8] Buzan, B., & Wæver, O. (2003). *Regions and powers: The structure of international security*. Cambridge University Press.
- [9] Cao, G. (2018). International health development assistance of BRICS countries. *Science Journal of Public Health*, 6(4), 111. <https://doi.org/10.11648/j.sjph.20180604.13>
- [10] Chin, G. (2014). The BRICS-led development bank: Purpose and politics beyond the G20. *Global Policy*, 5(3), 366-373. <https://doi.org/10.1111/1758-5899.12167>
- [11] Fewings, N., & Chin, G. T. (2024, July 9). The "new" New Development Bank: A decade plus in the making. Global Development Policy Center. Boston University. diakses November 28, 2024, from <https://www.bu.edu/gdp/2024/07/09/the-new-new-development-bank-a-decade-plus-in-the-making/>
- [12] Horness, P. (2015). Understanding paradigms and polarity in international relations. *Core*. Retrieved from <https://core.ac.uk/download/pdf/229226899.pdf>
- [13] Lissovlik, Y. (2023). BRICS-plus: The new force in global governance. *Journal of International Analytics*, 14(1), 138-148. <https://doi.org/10.46272/2587-8476-2023-14-1-138-148>
- [14] Mishra, A., Gadhia, J., Kubendran, N., & Sahoo, M. (2015). Trade flows between India and other BRICS countries: An empirical analysis using gravity model. *Global Business Review*, 16(1), 107-122. <https://doi.org/10.1177/0972150914553523>
- [15] Morozkina, A. (2015). The New Development Bank in global finance and economic architecture. *International Organisations Research Journal*, 10(2), 89-105. <https://doi.org/10.17323/1996-7845-2015-02-89>
- [16] Mearsheimer, J. J. (2014). *The tragedy of great power politics*. W. W. Norton.
- [17] Monteiro, N. P. (2011). Unrest assured: Why unipolarity is not peaceful. *International Security*, 36(3), 9-40. diakses from <https://www.jstor.org/stable/41428108>
- [18] Monteiro, Ana (29 December 2023). "BRICS to Grow as Saudi, Iran, UAE, Egypt, Ethiopia Join Ranks". Bloomberg News. Archived from the original on 31 December 2023. <https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-12-29/brics-to-grow-as-saudi-iran-uae-egypt-ethiopia-join-ranks>
- [19] Pyzhev, A. (2023). Why forest economy can become a driving force of the development of BRICS cooperation. *BRICS Journal of Economics*, 4(4), 411-422. <https://doi.org/10.3897/brics-econ.4.e112531>
- [20] Sharma, Shweta (24 August 2023). "Brics countries agree major expansion as 6 countries invited to join". *The Independent*. Archived from the original on 25 August 2023. <https://www.independent.co.uk/news/world/africa/brics-2023-summit-new-members-saudi-uae-iran-b2398553.html>
- [21] Singh, D. (2023). The role of India towards economic growth and development of BRICS member countries. *Asian Journal of Education and Social Studies*, 40(3), 1-9. <https://doi.org/10.9734/ajess/2023/v40i3873>
- [22] Tian, X., Sarkis, J., Geng, Y., Bleischwitz, R., Qian, Y., Xu, L., ... & Wu, R. (2020). Examining the role of BRICS countries at the global economic and environmental resources nexus. *Journal of Environmental Management*, 262, 110330. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.110330>
- [23] Vyas-Doorgapersad, S. (2022). The role of BRICS in global governance to promote economic development. *Africa's Public Service Delivery and Performance Review*, 10(1). <https://doi.org/10.4102/apsdpr.v10i1.633>
- [24] Wani, S. (2023). Gravity model approach: An empirical application with implications for BRICS countries. *The Indian Economic Journal*, 72(2), 340-352. <https://doi.org/10.1177/00194662221137267>